



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab.Way Kanan)

Anesya Freni Livia

Universitas Mitra Indonesia

Korespondensi penulis: anesyafrenilivia2022.student@umitra.ac.id

Nursalma Nursalma

Universitas Mitra Indonesia

Meita Sekar Sari

Universitas Mitra Indonesia

Universitas Mitra Indonesia, Jl. Z.A. Pagar Alam No. 7 Gedong Meneng, Bandar Lampung 12345

Abstract. *This research aim to analyze the influence of internal control system and good government governance toward village funds fraud prevention management in pakuan ratu sub-district way kanan regency. In this research, the researcher used quantitative method by using primary data which is questionnaire. The population that the researcher used was all of the village government officials in 3 districts in pakuan ratu sub-district, way kanan regency. the sample that the researcher used is saturated sampling technique and there were 57 village government officials. the technique to analyze the data by using validity test, reliability test, double linier regression and classic assumption test with SPSS 23 version. The result of this research shows that internal control system makes significantly good effect toward village funds fraud prevention and good government governance.*

Keywords: *internal control system, good government governance, village funds, fraud, prevention*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa didesa pakuan ratu, Kab.Way Kanan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa pada 3 Desa diKecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 57 aparatur pemerintah desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, Uji Reliabilitas, regresi linier berganda dan uji asumsi klasik menggunakan SPSS versi 23. Dari hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, *good government governance*, pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Negara Indonesia terbagi dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Provinsi adalah pemerintahan yang berada dua tingkat di bawah Negara, setiap provinsi dipimpin oleh gubernur. Kabupaten adalah salah satu bentuk wilayah administratif di Indonesia yang terdiri dari beberapa

kecamatan, wilayah kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang disebut bupati. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah perlu memiliki rencana keuangan yang terstruktur dan terukur. sebuah dokumen penting yang menjadi landasan dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran bukan hanya sekedar rencana keuangan, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun dan telah disahkan oleh program-program yang telah disahkan, berupa rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang dalam jangka waktu tertentu (Savitri, 2018). Anggaran yang digunakan untuk sistem pemerintahan ada 2 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 tentang Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah desa menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta peraturan menteri desa dan peraturan menteri keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan dana desa. Tahun 2021, total dana desa sebesar Rp.72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp.71,85 triliun pada 74.939 desa.

Dana desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh

kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran dana desa reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : Tahap I (40 persen) bulan Januari, Tahap II (40 persen) bulan Maret, dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran dana desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp.46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut (Hardiwinoto,2020),*Good Government Governance* merupakan sebuah konsep yang mengacu terhadap proses pencapaian suatu keputusan serta pelaksanaan yang akan dilakukan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. *Good Government Governance* mendasarkan terhadap sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintahan, warga Negara, dan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Pencegahan kecurangan (*Fraud*) menurut *Black Low Dictionary* dalam Atmadja, et al (2018) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Tujuan Penelitian Dari latar belakang, identifikasi, batasan masalah, dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di desa pakuan ratu, Untuk mengetahui pengaruh *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di desa pakuan ratu dan Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di desa pakuan ratu.

KAJIAN TEORITIS

Teori Triangle

Fraud triangle theory pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* merupakan ide yang timbul dari penyebab munculnya kecurangan. Sebagaimana namanya *fraud triangle* maka penyebab dari *fraud triangle* terdiri dari tiga komponen yang umumnya ada pada saat *fraud* terjadi. *Fraud triangle theory* Menurut (Boyton,2018) ada tiga hal yang menjadi penyebab *fraud* yang diketahui sebagai *fraud triangle* diantaranya *rationalization*, *pressure*, dan *opportunity*. *Rationalization* adalah ketika seseorang melakukan pembenaran *fraud* yang telah dilakukannya. *Opportunity* adalah kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan sesuai dengan jabatan yang dimiliki. *Pressure* adalah dorongan untuk melakukan kecurangan hal ini bergantung pada individu.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang Pengaruh sistem pengendalian internal dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Desa diKampung Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang terkait dalam pengelolaan dana desa di 3 desa pada Pemerintah desa kecamatan pakuan ratu, kabupaten way kanan berjumlah 57 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan yang kemudian diisi oleh setiap responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) kuesioner (angket) dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara.

Alat Analisis

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu program IBM SPSS 23. Adapun analisis yang digunakan adalah uji validitas, Uji Reliabilitas, regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung.

Analisis Data

Analisis data akan diuraikan dari hasil survei yang sudah diterima. Data primer pada penelitian ini ialah kuesioner yang memuat pernyataan-pernyataan mengenai variabel yang dipilih peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan 57 kuesioner yang sudah dijawab dengan lengkap sesuai dengan kriteria yang tercantum sehingga dapat dianalisis. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Perhitungan Uji Validitas

Variabel Penelitian	Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Hasil	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Internal (X ₁)	X _{1.1}	0,904	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{1.2}	0,838	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{1.3}	0,790	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{1.4}	0,783	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{1.5}	0,783	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
Good Government Governance (X ₂)	X _{2.1}	0,424	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{2.2}	0,809	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{2.3}	0,748	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{2.4}	0,833	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	X _{2.5}	0,606	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,799	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	Y.2	0,621	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid

Variabel Penelitian	Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Hasil	Kesimpulan
	Y.3	0,555	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	Y.4	0,667	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	Y.5	0,708	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid
	Y.6	0,488	0,423	r _{hitung} > r _{tabel}	Valid

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Uji validitas dilakukan terhadap 20 responden dimana angka ini merupakan nilai korelasi antara tiap item dengan skor total item. Dalam pengujian uji validitas 20 responden didapatkan nilai r tabel sebesar 0,423 (rtabel terlampir).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas X₁, X₂ dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,856	Relliabel
Good Government Governance (X2)	0,795	Relliabel
Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,834	Relliabel

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Hasil uji reliabilitas pada nilai hitung *cronbach's alpha* dalam setiap variable menunjukkan angka >0,60. Maka realibilitas dapat diterima, sehingga pada penelitian ini masin-masing variabel menunjukkan bahwa *cronbach's alpha* >0,60, Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dinyatakan lolos uji reliabilitas atau reliabel.

Uji Normalitas

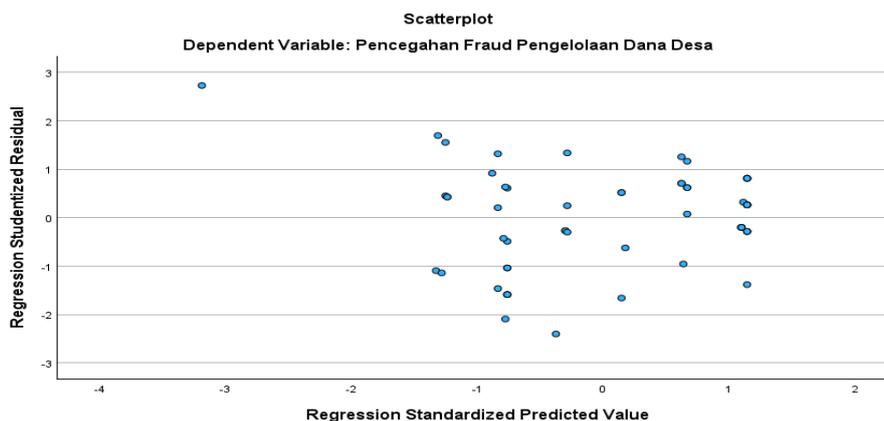
Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N	57		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.83028277	
Most Extreme Differences	Absolute	.106	
	Positive	.080	
	Negative	-.106	
Test Statistic	.106		
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.169		
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.108	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.100
		Upper Bound	.115
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa variabel residual dalam penelitian ini mempunyai nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar $0,169 > 0,05$, bahwa model regresi yang digunakan layak dan memenuhi asumsi normalitas atau dengan kata lain data yang digunakan dalam penelitian normal.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji herteroskedastisitas dengan scatterplot

Sumber: Hasil olahData IBM SPSS 23

Hasil Uji Heteroskedastisitas diatas, grafik *Scatterplot* yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa titik–titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolineritas

Tabel 4. Uji Multikolineritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14.216	3.557		3.997	<.001		
	Sistem Pengendalian Internal	.052	.129	.027	4.404	.000	.932	1.073
	Good Government Governance	1.657	.124	.878	13.382	<.001	.932	1.073

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Nilai tolerance masing-masing variabel bebas menunjukkan bahwa nilai dari sistem pengendalian internal (X_1) 0,932 dan *good government governance* (X_2) 0,932 dari masing-

masing nilai *Tolerance* 0,932 > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Kemudian pada masing-masing variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal (X_1) 1.073 dan *good government governance* (X_2) 1.073 dari masing-masing nilai VIF 1.073 < 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.838	.828	1.638	2.302
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, Sistem Pengendalian Internal, Good Government Governance					
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa					

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

1,645 (du) < 2,302 (dw) < 2,355 (4-du) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi didalam penelitian ini.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.216	3.557		3.997	<.001		
	Sistem Pengendalian Internal	.052	.129	.027	4.404	.000	.932	1.073
	<i>Good Government Governance</i>	1.657	.124	.878	13.382	<.001	.932	1.073
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa								

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Besarnya nilai suatu kostanta (*constant*) dalam penelitian ini sebesar 14,216. Yang artinya nilai independen (variable sistem pengendalian internal, *good government governance*) dianggap konstan. Maka rata-rata pencegahan *fraud* atas dana desa sebesar 14,216.

Nilai $b_1 = 0,52$ yang memiliki arti jika variabel sistem pengendalian internal (X_1) terjadi kenaikan sebesar satu (satuan) maka variabel pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) akan terjadi kenaikan sebesar 0,52.

Nilai $b_2 = 1,657$ yang memiliki arti jika variabel *good government governance* (X_2) terjadi kenaikan sebesar satu (satuan) maka variable pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) akan terjadi kenaikan sebesar 1,657.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.838	.828	1.638	2.302
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, Sistem Pengendalian Internal, <i>Good Government Governance</i>					
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa					

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Besarnya nilai yang diperoleh *Adjusted R-Square* sebesar 0,828 yang berarti 82,8% variabel sistem pengendalian internal dan *good government governance* dipengaruhi oleh pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya (100-82,2%) adalah sebesar 17,2% yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan.

Uji Ketepatan Model (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Ketepatan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	678.544	2	339.272	97.660	<.001 ^b
	Residual	187.596	54	3.474		
	Total	866.140	56			
a. Dependent Variable: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), <i>Good Government Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal						

Sumber: Hasil olah Data IBM SPSS 23

Nilai F_{hitung} sebesar 97.660 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,17. Karena nilai $F_{hitung} 97.660 > F_{tabel} 3,17$ dan nilai $sig 0,001 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel sistem pengendalian internal (X_1) dan *Good government governance* (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.216	3.557		3.997	<.001		
	Sistem Pengendalian Internal	.052	.129	.027	4.404	.000	.932	1.073
	Good Government Governance	1.657	.124	.878	13.382	<.001	.932	1.073

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal (X_1) dilihat dari nilai T_{hitung} $4.404 > 1,673 T_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel X_1 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y). Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima. (T_{tabel} terlampir).

Good government governance (X_2) dilihat dari nilai T_{hitung} $13,382 > 1,673 T_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Variabel X_2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y). Maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima. (T_{tabel} terlampir).

Pembahasan

Berdasarkan penelitian dengan judul pengaruh “sistem pengendalian internal dan *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Studi pada pemerintahan desa pakuan ratu kabupaten way kanan)” terdapat jumlah responden sebanyak 57 responden. pada variabel sistem pengendalian internal (X_1) terdapat 5 indikator dengan 5 item pernyataan, untuk *good government governance* (X_2) terdapat 5 indikator dengan 5 item pernyataan dan untuk pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) terdapat 3 indikator dengan 6 item pernyataan.

Dalam penelitian ini terdapat jumlah responden sebanyak 57 responden. pada variabel sistem pengendalian internal (X_1) terdapat 5 indikator dengan 5 item pernyataan, untuk *good government governance* (X_2) terdapat 5 indikator dengan 5 item pernyataan dan untuk pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) terdapat 3 indikator dengan 6 item pernyataan.

Sistem pengendalian internal (X_1) dilihat dari nilai T_{hitung} $4.404 > 1,673 T_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel X_1 secara parsial berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) . Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima.

Good government governance (X_2) dilihat dari nilai $T_{hitung} 13,382 > 1,673 T_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Variabel X_2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y). Maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil analisis diketahui variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa maka akan semakin meminimalisir terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa.
2. Hasil analisis diketahui variabel *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin baik penerapan *good government governance* maka akan semakin mempersempit adanya ruang untuk melakukan penyelewengan pada pengelolaan dana desa.
3. Sistem pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dilihat dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig < 0,05$ sehingga hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa
Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara lebih sering, misalnya setiap 4 bulan atau 6 bulan, untuk memastikan identifikasi dan penanganan masalah secara lebih cepat dan tepat. Selain itu pemerintah juga harus terus menerapkan *good government governance* pada pengelolaan dana desa agar pada pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa menjadi lebih terarah dan lebih baik. Untuk mencegah adanya *fraud* atas dana desa pemerintah desa harus lebih meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dan *good government governance*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel atau desa yang menjadi penelitian, misalnya yang diteliti se-kecamatan Pakuan Ratu.

Diharapkan dapat memperluas penelitian dengan meneliti faktor-faktor lain yang membantu mencegah *fraud* pada pengelolaan dana desa yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti *whistleblowing* sistem dan *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Meita Sekar Sari dan Dwi Anggraeni Saputri (2019). "Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Persediaan Pada PT. Indofarma Global Medica Bandar Lampung." *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian 2019 IBI DARMAJAYA Bandar Lampung, 28 Agustus 2019*

Salma, Nur, Et Al.(2023). "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Investasi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)." *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau 1*.(1), 95-107.

Silvia, Dewi & Surya, Andi. (2023). "Efektifitas Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa." *Seminar Nasional-Universitas Borobudur*.2,1.

Buku Teks

Sudaryono.2018. "*Metodologi Penelitian*." Raja Grafindo.

Sugiyono. (2018). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*." Bandung: Alfabeta.

Sumber Undang-undang

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa.

Peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Keuangan.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber dari internet dengan nama penulis

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

<https://djp.kemenkeu.go.id>

<https://antikorupsi.org/id>

The Fraud Triangle Theory with its three elements 7386943 Vector Art at Vecteezy